

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Prenada Media, Jakarta, 2008
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, 2007
- C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia: suatu pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2010
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2014
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002
- Patrik Purwahid, Dasar – Dasar Hukum Perikatan, Semarang: Mandar Maju, 1994
- Pieter E Latumeten, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya, Jakarta: Tuma Press, 2011
- P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2009
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- R. Soetojo Prowirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (*Personen en Familie-Recht*), Surabaya: Airlangga University Press, 1991
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung: Intermasa, 2002
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1986
- Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: CV Mandar Maju, 2004

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia, 1960, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 174, Sekretariat Negara, Jakarta

- Republik Indonesia, 1960, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 104, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 1961, Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukkan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 1961 No. 2344, Menteri Agraria, Jakarta
- Republik Indonesia, 1989, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara RI Tahun 1989 No. 49, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 1996, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembar Negara RI Tahun 1996 No. 42, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 1997, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembar Negara RI Tahun 1997 No. 59, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 1998, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
- Republik Indonesia, 1998, Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembar Negara RI Tahun 1997 No. , Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 2006, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 22, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 67, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, MARI No. 925/K/Sip/1974, tanggal 27 Mei 1975
- Republik Indonesia, Surat Mahkamah Agung RI No. Ma/kumdil/171/V/K/1991, tanggal 8 Mei 1991